



Hari/Tanggal	: Senin, 14 Oktober 2019
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai (didahului makan siang)
Tempat	: Ruang Rapat Lantai 23, Gedung II BPPT Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat
Agenda	: 1. Pembukaan oleh Ketua DRN; 2. Penjelasan mengenai surat DRN yang ditujukan kepada Presiden; 3. Diskusi; 4. Lain-Lain 5. Penutup

RANGKUMAN RAPAT BP IV

A. PEMBUKAAN

Rapat dibuka oleh Ketua DRN, dan menyampaikan bahwa rapat BP IV ini sangat penting, karena tugas DRN yang selama ini fokus tentang Inovasi, yakni berdasarkan pada UUD 1945 dan Nawacita (khususnya Nawacita Ke-6) yang mengandung kata Daya Saing. Pemikiran Inovasi ini dilaksanakan dalam rangka membantu Kemenristek tentang Inovasi.

Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik belum ada program yang jelas seperti halnya Nawacita pada pelantikan Presiden tahun 2014, kecuali tentang Visi Presiden yang sudah disampaikan.

Selama 2-3 tahun ini, pemikiran DRN tentang inovasi khususnya tentang Inovasi telah mengerucut pada pemikiran pentingnya inovasi yang mampu meningkatkan GDP, sehingga DRN telah menyiapkan innovative champion dari masing-masing Komtek, yang telah dibahas pada SP II di Bali, yang akan dikirimkan kepada Presiden terpilih tahun awal tahun 2020.

Namun berdasarkan pada Rapat BP III 17 September 2019 tentang status DRN dan BRN dengan mengundang narasumber Dr. Karjono Atmoharsono – Sestama BPIP, maka DRN

telah memutuskan untuk mengadopsi saran Dr. Karjono tersebut yang menyatakan berdasarkan Pasal 98 UU No. 11/ 2019, DRN tidak dibubarkan (masih tetap eksis), sehingga DRN perlu berbuat sesuatu yaitu mengusulkan perlunya pembentukan Dewan Pengarah BRN yang langsung dipimpin Presiden, sebagaimana di BPIP.

B. TINDAK-LANJUT

Menindaklanjuti saran tersebut Ketua DRN berinisiatif untuk menyusun draft Surat kepada Presiden, dan setelah mendapatkan masukan dari Komtek TIK, surat tersebut disusun dengan tema “Pembangunan Kapasitas Inovasi Nasional Untuk Ekonomi Digital Mandiri”.

Ekonomi digital memang sudah dijadikan pedoman pembangunan di negara-negara SEAN, Ekonomi Digital di Indonesia, baru dibahas di beberapa pertemuan terbatas (misal pertemuan yang diselenggarakan oleh CIPG), dan belum digaungkan oleh Pemerintah atau belum menjadikan ekonomi digital sebagai program utama dalam pembangunan perekonomian, atau dengan kata lain belum menjadi Skenario Pertumbuhan yang berbasis Inovasi. Hal ini berdasarkan berbagai referensi, bahwa ekonomi digital juga didasari oleh kata kunci Inovasi. Melalui modal Inovasi yang berbasis pada teknologi yang telah dikuasai dapat dijadikan dasar peningkatan kapasitas inovasi sebagai modal pembangunan ekonomi berbasis teknologi digital.

C. DISKUSI MASUKAN

Atas konsep surat ini, maka berbagai masukan telah dibahas dan akan segera disempurnakan. Adapun masukan-masukan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya diberikan rincian solusi atas ide ekonomi digital tersebut, yakni bagaimana dilaksanakan, bagaimana merubah dan bagaimana menyusun organisasi agar dapat berhasil. Dengan kata lain bagaimana penjabaran untuk mendapatkan nilai tambah dan manfaatnya.
- 2) Perlunya meng-“address pada permasalahan yang ada, misalnya masalah spesifik konektivitas, dan perlunya integrasi, mengingat beragamnya sumber daya alam, budaya, dan sebagainya antar daerah kabupaten, sehingga bersifat spesifik untuk negeri, dan untuk ini diperlukan “slogan”.
- 3) Ekonomi digital dikembangkan pada dasarnya berbasis pada teknologi-teknologi di masing-masing Komtek, misalnya digitalisasi di Komtek Pangan dan Pertanian tentang ekonomi digital untuk traktor.
- 4) Pelaksanaan program untuk ekonomi digital ini perlu dipimpin langsung oleh Presiden, karena tidak mungkin dapat ditangani oleh suatu Kementerian saja.
- 5) Kata Mandiri dalam terminologi Ekonomi Digital Mandiri dimaksudkan untuk mengadopsi teknologi digital dari luar yang kemudian dikembangkan di Indonesia sesuai dengan aplikasi /kebutuhan nasional.

- 6) Perlu diberikan latar-belakang tentang pentingnya ekonomi digital (misalnya kontribusi teknologi digital terhadap GDP yang sangat besar, yakni 11%) dan mengapa penting DRN / DEPRIN menjadi Pengarah BRIN, dengan mengacu pada UU.
- 7) Perlunya ditekankan bahwa program ekonomi digital ini mempunyai tujuan akhir adalah kemakmuran bangsa
- 8) Draft surat ini terfokus 2 hal yang berbeda yaitu ekonomi digital dan dewan pengarah, dimana keduanya belum terhubung.

D. KESIMPULAN

Draft surat ini dinilai sudah runtut, sehingga yang diperlukan adalah perbaikan secara redaksional, dengan menekankan berbagai hal sebagaimana tersebut pada masukan-masukan di atas

Jakarta, 14 Oktober 2019

Suyanto Pawiroharsono